

## DKI Targetkan Penurunan 41 Persen Partikel Polusi Udara Berbahaya

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penurunan 41 persen polutan berbahaya PM2,5 pada 2030 melalui tiga strategi dan 75 rencana aksi pengendalian pencemaran udara. Partikulat PM2,5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron atau mikrometer.

"PM2,5 ini menimbulkan dampak kesehatan yang parah baik untuk jangka pendek dan jangka panjang," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto dalam paparan publik strategi pengendalian pencemaran udara di Balai Kota Jakarta, Senin (19/9).

Berdasarkan pemaparan DLH DKI, hasil pengukuran dari lima Stasiun Pengukuran Kualitas Udara (SPKU) menunjukkan polutan PM2,5 dan PM10 sudah jauh di atas baku tahunan nasional.

Indeks kualitas udara Jakarta dari tahun ke tahun berada pada tingkat rendah dibandingkan daerah lain dengan nilai 53,50 hingga 78,78.

Adapun tiga strategi itu, yakni peningkatan tata kelola pengendalian pencemaran udara, mengurangi pencemaran udara dari sumber bergerak dan pengurangan emisi dari sumber tidak bergerak.

Untuk strategi pertama terkait peningkatan tata kelola pengendalian pencemaran udara, lanjut dia, rencana aksi di antaranya meningkatkan

inventarisasi emisi berkelanjutan, meningkatkan pemantauan dan evaluasi hingga pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran udara.

Strategi kedua, yakni mengurangi pencemaran udara dari sumber bergerak di antaranya melalui peremajaan angkutan umum, pengembangan transportasi ramah lingkungan untuk transportasi publik dan pemerintah.

### Transjakarta operasikan bus listrik

Untuk transportasi ramah lingkungan, Pemprov DKI melalui BUMD Transjakarta kini mengoperasikan 30 unit bus listrik dan target 100 unit akhir 2022.

Kemudian, penerapan uji emisi kendaraan bermotor dan pengembangan kawasan rendah emisi, meningkatkan infrastruktur untuk mendukung kesadaran menggunakan transportasi umum hingga manajemen rekayasa lalu lintas.

Strategi ketiga, yakni pengurangan emisi dari sumber tidak bergerak di antaranya dengan memperbanyak ruang terbuka hijau, memperbanyak instalasi panel surya atap, mengendalikan polusi udara dari kegiatan industri.

Rencananya, tiga strategi dan 75 rencana aksi itu akan dituangkan dalam peraturan gubernur terkait strategi pengendalian pencemaran udara yang saat ini sedang tahap finalisasi. ● yan

## DPRD DKI Respons Positif Inpres Kendaraan Listrik

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyambut positif inpres 7/2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Itu adalah hal yang baik dalam menyongsong perubahan perbaikan udara Jakarta menjadi lebih baik," ujar Gembong, Senin (19/9).

Gembong menambahkan, inpres kendaraan listrik merupakan hal yang baik bagi Jakarta dalam rangka memperbaiki kualitas udara menjadi lebih baik.

Dia mengatakan, penggantian kendaraan dinas menjadi kendaraan listrik bagi pejabat dinas merupakan pilihan. Pilihan pertama, jika seorang pejabat dinas memiliki kendaraan dinas yang usianya sudah tua boleh melakukan pembelian kendaraan dinas listrik. Pilihan kedua, jika kendaraan dinas masih dinilai baru atau baru 1 tahun pemakaian diarahkan untuk melakukan modifikasi kendaraan menjadi kendaraan listrik.

"Kendaraan dinas yang relatif masih baru bisa dilakukan modifikasi tetapi jika kendaraan yang usianya sudah tua bisa beli kendaraan baru, kendaraan listrik. Ini dalam rangka

perubahan cuaca Jakarta ke arah yang lebih baik," katanya.

Diketahui, Inpres 7/2022 menyatakan percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*).

Presiden memberikan instruksi kepada para menteri, gubernur hingga bupati untuk mengganti kendaraan dinas operasional atau kendaraan perorangan menjadi kendaraan berbasis listrik. Penandatanganan inpres tersebut dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 13 September 2022.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyambut baik inpres kendaraan listrik ini pada Kamis (15/9), di Balai Kota, Jakarta Pusat.

"Kami (Pemprov DKI Jakarta) akan dukung pengadaan mobil-mobil dinas baik kendaraan roda empat maupun roda dua menjadi kendaraan berbasis listrik. Kami akan mulai secara bertahap menggunakan kendaraan listrik."

Dia menyatakan, penggantian kendaraan ini dilakukan sebagai solusi terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang semakin tinggi. Sehingga, perlahan-lahan setiap tahunnya Pemprov DKI akan berupaya untuk menambah kendaraan listrik. ● yan

## Pesan Anies untuk ASN: Harus Jadi Pembawa Kesejahteraan dan Keadilan

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memimpin upacara peringatan Hari Rapat Raksasa Ikada ke-77 di Monumen Nasional (Monas), Senin (19/9).

Dalam kesempatan tersebut, Anies meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menguatkan integritas.

"Itu adalah pesan utama perjuangan mereka (pahlawan)," kata Anies.

Selain integritas, Anies juga menekankan para ASN untuk memiliki keseriusan dalam membangun dan menghadirkan keadilan sosial.

Ia mengingatkan ASN untuk mengimplementasikan hal itu dalam lingkungan kerja.

"Kita harus menjadi pembawa kesejahteraan dan keadilan," ucapnya.

Menurut dia, ASN yang saat ini menikmati hasil per-

juangan pahlawan dan aspirasi rakyat yang hadir dalam Rapat Raksasa Ikada, untuk tidak melupakan momentum tersebut, bukan hanya sekedar ritual peringatan.

"Kita semua yang bertanggung jawab sehingga harus memastikan cita-cita dan janji kemerdekaan bisa terlaksana semua. Jangan pandang kegiatan ini semata sebagai ritual tahunan," katanya.

Ia juga meminta para ASN untuk membawa kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat, bukan sebaliknya menjadi "penghisap" rakyat.

Anies mengatakan, para ASN memiliki tanggung jawab untuk memastikan cita-cita para pejuang terdahulu agar dapat ditunaikan.

Dalam upacara tersebut hadir veteran kemerdekaan, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria dan ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. ● yan

# 4 | Metropolis

FOTO: ANT



## 40 Perusahaan Buka Lapangan Pekerjaan di Bursa Kerja

Mayoritas perusahaan yang mendaftar bergerak di bidang retail dan berlokasi di wilayah Jakarta Barat. Di antaranya BCA Finance, PT Samudera Indonesia, PT Sahabat Dua Muda, Erajaya, PT Mayora Indah Tbk, Banban, MI, MSIG, Indomaret dan Agung Podomoro Land. Selain itu Aragon Grup, Sentral Cargo, PT Lobunta Kencana Raya, Century, PT Pulau Intan Baja Perkasa, Anugrah dan sebagainya.

JAKARTA (IM) - Sebanyak 40 perusahaan membuka lapangan pekerjaan melalui bursa kerja (*job fair*) di Mall Taman Palm Cengkareng, Jakarta Barat, pada 20-21 September 2022.

"Ada 40 perusahaan yang

terdaftar dalam kegiatan 'job fair' besar," kata Kepala Seksi Pelatihan, Penempatan, Produktivitas dan Transmigrasi pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi (Sudin Nakertrans) dan Energi Jakarta Barat, Yasil Farabi saat dihubungi di Jakarta, Senin (19/9).

Perusahaan terdaftar di antaranya BCA Finance, PT Samudera Indonesia, PT Sahabat Dua Muda, Erajaya, PT Mayora Indah Tbk, Banban, MI, MSIG, Indomaret dan Agung Podomoro Land. Selain itu Aragon Grup, Sentral Cargo, PT Lobunta Kencana Raya, Century, PT Pulau Intan Baja Perkasa, Anugrah dan sebagainya.

Mayoritas perusahaan yang mendaftar bergerak di bidang

retail dan berlokasi di wilayah Jakarta Barat.

Sebelum terdaftar, Yasil bersama jajarannya sudah menyeleksi perusahaan tersebut demi memastikan perusahaan yang tergabung dalam kondisi sehat secara keuangan.

Pihaknya mengutamakan perusahaan yang tidak pernah tersandung masalah upah ataupun sengketa kepegawaian lainnya. "Kita juga punya rekam jejak perusahaan mana saja yang sekiranya pernah bermasalah di Jakarta Barat," kata dia.

Kegiatan ini merupakan kali kedua pihak Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat menyelenggarakan bursa kerja setelah sebelumnya digelar di

Mall Season City pada Selasa (2/8).

"Kegiatan diikuti sekitar 10.000 warga. Target 3.000 peserta, tetapi yang datang mencapai 10.000 peserta," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Nakertrans) DKI Jakarta, Andri Yansyah saat ditemui di Jakarta Barat saat itu. Hal tersebut, kata dia, menandakan tingginya animo masyarakat dalam merespons kegiatan bursa kerja yang digelar oleh Dinas Nakertrans DKI ini.

Menurut Andri, kegiatan ini tidak hanya diramalkan oleh warga Jakarta Barat saja melainkan seluruh warga DKI bahkan luar wilayah DKI Jakarta. ● yan

## Banyak Sepeda Hilang di Stasiun KRL, Pemilik Dipersulit Saat Lapori

JAKARTA (IM) - Komunitas Bike to Work menerima 27 laporan sepeda hilang di stasiun KRL yang dikelola grup PT Kereta Api Indonesia di wilayah Jabodetabek sejak April 2021. Parahnya lagi, sejumlah pengguna KRL yang kehilangan sepeda itu merasa dipersulit saat melaporkan ke petugas keamanan stasiun maupun polisi.

Komunitas itu lantas mengajak warga mengaudit penyediaan dan pengelolaan layanan parkir sepeda di stasiun KRL. Hal ini diutarakan Ketua Umum Bike to Work (B2W) Indonesia, Fahmi Saimima dalam diskusi bertajuk "Menuju Stasiun Ramah Sepeda" di Jakarta, Senin (19/9).

Menurut Fahmi, sepeda hilang banyak terjadi di stasiun-stasiun yang tidak memiliki fasilitas parkir sepeda memadai serta ramai pengguna KRL, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.

"Ini juga sudah hari kelima, sahabat kami Mba Silvi dari B2W Bekasi kehilangan sepeda di Stasiun Bekasi," kata Fahmi. Silvi merasa dipersulit saat hendak melaporkan kehilangan sepedanya itu ke petugas keamanan stasiun dan juga pihak kepolisian.

"Keresahan dia saat kehilangan sepeda, ia mau seku-

ritu memperlihatkan rekaman CCTV, tapi dibilang itu bukan wewenang mereka. Lalu, disuruh ke polisi, malah diminta kuitansi pembelian sepeda," cerita Fahmi.

Dalam kasus kehilangan sepeda di Stasiun KRL ini, B2W mencatat adanya pola berulang yang harus dievaluasi. B2W lantas menginisiasi gerakan publik untuk mengaudit parkir sepeda di stasiun KRL.

Sebanyak 120 sukarelawan, bukan hanya pesepeda, melainkan juga ahli tata kota hingga advokat, akan turun ke 27 stasiun. Audit akan dilakukan pada 17-24 September. Mereka akan melakukan audit dengan daftar standar parkir ramah sepeda yang mereka buat.

Lalu, hasilnya akan mereka laporkan kepada perusahaan dan lembaga terkait, seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ombudsman, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

"Kami membuat check list audit dari sisi fasilitas, dari aksesibilitas, bagaimana sepeda itu dianggap oleh konsumen, sekuriti, pengelola, dan sebagainya. Goals-nya adalah membuat parkir sepeda yang nyaman dengan saran-saran dari audit ini," katanya.

Hal ini ditanggapi langsung oleh Vice President Train Ser-

VICES Facilities and Customer Care Division PT KAI, Teguh Triyono yang hadir dalam acara diskusi tersebut. "Kami dari PT KAI mohon maaf sebesar-besarnya atas yang terjadi pada parkir sepeda di stasiun kami," ujarnya.

Ia menyebut, kasus pencurian dimungkinkan terjadi karena 70 persen lokasi parkir jauh dari pemantauan petugas. Selain itu, daerah parkir sepeda rata-rata belum dilengkapi kamera pemantau (CCTV). Terkait hal itu, dalam waktu seminggu ke depan, pihaknya akan merelokasi area parkir sepeda di 10 stasiun. Stasiun itu meliputi Stasiun Manggarai, Lenteng Agung, Pondok Ranji, Tanah Abang, Sudirman, Jurgangmangu, Tangerang, Palmerah, Bekasi, dan Serang.

"Selain memindahkan lokasi parkir, kami juga akan menyediakan kunci tambahan dan kartu tukar kunci. Untuk kartu, setiap hari akan berbeda warna. Ini untuk keamanan pengguna yang menitipkan sepedanya di stasiun kami," kata Teguh.

Untuk pengembangan ke depan, Teguh mengatakan, KAI juga berencana mengutamakan pelayanan dengan menyiapkan petugas yang didedikasikan untuk menangani keluhan pesepeda. ● yan

## Dihadang Warga, Eksekusi Lahan di Gunung Sahari Selatan Batal

JAKARTA (IM) - Eksekusi pengosongan tempat tinggal di Gang Langgar RT10/01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Senin (19/9), batal setelah mendapat perlawanan dari warga.

Warga yang sebagian besar merupakan lanjut usia tersebut menghadang petugas di depan gang sejak awal dari agenda eksekusi yang dijadwalkan pukul 08:00 WIB.

Adapun rencana eksekusi pengosongan lahan di wilayah itu dilakukan menyusul adanya amar putusan PN Jakarta Pusat No.256/Pdt.G/2018/PN.Jks. Pst jo Putusan PT DKI Jakarta No.221/PDT/2019/PT.DKI Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.510 K/Pdt/2020. Ketua RT10/01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan.

Hana Handani, mengatakan ia dan warga lainnya menolak eksekusi pengosongan lahan yang menjadi tempat tinggal mereka sejak puluhan tahun itu. Ia menilai eksekusi lahan tersebut tidak berdasar. "Tiba-tiba mau dieksekusi, ya kami tegas menolak. Dasarnya apa kami pun tidak jelas, apalagi kan kami masih ada upaya hukum lainnya di pengadilan," ujar Hana di lokasi.

Hana mengungkapkan di lahan tersebut terdapat 9 rumah yang dihuni 9 Kepala Keluarga (KK). Ia berharap eksekusi tersebut tidak dilakukan. Sementara itu, kuasa hukum warga, Sahat M Gultom, menambahkan, penolakan eksekusi pengosongan sebagaimana Penetapan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.09/Pdt.Eks/2022 dan No.10/Pdt.Eks/2022 atas berbagai hal.

Pertama, sertifikat HGB No.1882 tercatat milik PT Ayalis Langgeng Wisesa telah dibatalkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta hingga status tanahnya menjadi tanah negara. "Karena tanah HGB No.1882 telah kembali menjadi tanah negara, maka bidang tanah yang dimaksud dalam Penetapan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.09/Pdt.Eks/2022 dan No.10/Pdt.Eks/2022 tidak bisa dijadikan objek eksekusi," jelasnya.

Selain itu, bidang tersebut masih terdapat proses hukum yang masih berlangsung, baik proses hukum pidana maupun tata usaha negara. Maka dari itu, ia menilai warga menolak adanya eksekusi. ● yan



PENGATURAN JAM KERJA UNTUK ATASI KEMACETAN Sejumlah kendaraan bermotor yang akan menuju Jakarta terjebak kemacetan di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Bekasi, Jawa Barat, Senin (19/9). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merancang uji publik yang melibatkan instansi pemerintah pusat, daerah dan asosiasi terkait usulan pengaturan jam kerja, untuk menekan kemacetan jalanan yang saat ini telah mencapai 48 persen.



**drilchem**  
Wellbore Stability & Loss Control Experts

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT OBM DRILCHEM Tbk.**

Direksi PT OBM DRILCHEM Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 12 Oktober 2022  
Waktu : 14:00 WIB – selesai  
Tempat : Dipo Business Center Lantai 7  
Jl. Gatot Subroto kav 50-52 Jakarta 10260

**Mata Acara RUPS Luar Biasa :**  
Penggantian Susunan Dewan Komisaris

**Catatan :**

- Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020.
- Pemegang Saham yang berhak hadir adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan dalam rekening kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 pukul 16:00 WIB.
- Sebagai langkah pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan akan melakukan RUPSLB secara Daring ("Online")

Jakarta, 20 September 2022  
Direksi PT OBM DRILCHEM Tbk